

BAB II

LANDASAN KONSEPTUAL

A. Implementasi Program

1) Implementasi Program

Implementasi suatu program merupakan suatu yang kompleks, dikarenakan banyaknya faktor yang saling berpengaruh dalam sebuah sistem yang tidak lepas dari faktor lingkungan yang cenderung selalu berubah. Donald P. Warwick dalam bukunya Syukur Abdullah, mengatakan bahwa dalam tahap implementasi Kebijakan terdapat dua faktor yang mempengaruhi keberhasilan yaitu faktor pendorong (Facilitating conditions), dan faktor penghambat (Impeding conditions). (Abdullah 1988:17).

Lebih lanjut Syukur (1988:398) menjelaskan bahwa pengertian dan unsur unsur pokok dalam proses implementasi sebagai berikut :

- a. Proses implementasi Kebijakan ialah rangkaian kegiatan tindak lanjut yang terdiri dari pengambilan keputusan, langkah langkah yang strategis maupun operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu program atau kebijakan menjadi kenyataan, guna mencapai sasaran yang ditetapkan semula.
- b. Proses implementasi dalam kenyataanya yang sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil ataupun gagal sama sekali ditinjau dari hasil yang dicapai “outcomes” serta unsur yang pengaruhnya dapat bersifat mendukung atau menghambat sasaran program.
- c. Dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat empat unsur yang penting dan mutlak yaitu :

- a) Implementasi kebijakan tidak mungkin dilaksanakan dalam ruang hampa. Oleh karena itu faktor lingkungan (fisik, sosial, budaya dan politik) akan mempengaruhi proses implementasi program pada umumnya.
- b) Target group yaitu kelompok yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat program tersebut.
- c) Adanya program yang dilaksanakan.
- d) Unsur pelaksanaan atau implementer, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan implementasi tersebut.

Dari berbagai uraian tentang implementasi program diatas maka implementasi program merupakan suatu proses yang dinamis dan dapat di maknai sebagai pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan yang dapat memberikan dampak atau akibat bagi masyarakat yang dapat memberikan kontribusi dalam menanggulangi masalah yang menjadi sasaran program.

2) Model Implementasi Kebijakan Publik.

1. Model Implementasi menurut David C. Korten (dalam Haedar Akib dan Antonius Tarigan 2000:12) Model ini memakai pendekatan proses pembelajaran dan lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi program. Model kesesuaian Korten digambarkan sebagai berikut :bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program.
 - a. Kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat).

- b. Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana.
 - c. Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh *output* program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.
2. Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983) dalam (Subarsono, 2012). yang mengemukakan tiga variabel yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan, yaitu antara lain adalah:
 - a) sebuah karakteristik kebijakan (Ability of statute to structure implementation),
 - b) karakteristik dari masalah (Trackability of the problem), dan
 - c) lingkungan kebijakan (Non Statutory Variables Affecting Implementation).
3. Model implementasi Kebijakan Menurut Charles O. Jones

Charles O. Jones (dalam Siti Erna Latifi Suryana, 2009) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukar dengan istilah dengan tujuan (goals), program, keputusan (decisions), standar, proposal, dan grand design.

Pada tahapan implementasi menurut Charles O. Jones ada 3 (tiga) variabel yang mendukung keberhasilan pencapaian tujuan program, yaitu:

 - a. Organisasi : Pembentukan atau penataan kembali sumberdaya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan.

- b. Interpretasi : Menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
 - c. Penerapan: Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.
4. Model implementasi Kebijakan Menurut Edwar III.

Menurut Edward dalam Agustino (2006:149) untuk mencapai suatu keberhasilan terhadap implementasi kebijakan publik, maka diberlakukan empat faktor:

a. Komunikasi

Komunikasi memegang peranan penting dalam upaya memberikan pemahaman tentang sesuatu kepada orang lain. Melalui komunikasi memungkinkan adanya persamaan persepsi tentang sesuatu hal atau obyek tertentu. Oleh karena itu, komunikasi menjadi bagian yang penting dalam upaya membangun kesamaan persepsi dan cara pandang.

b. Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah di komunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi Apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa Sumberdaya, kebijakannya hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

c. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implemator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila

implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP).

SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

5. Menurut Grindle (Subarsono, 2012) terdapat dua variabel besar yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu lingkungan kebijakan (context of implementation) dan isi kebijakan (content of policy). Variabel tersebut masing-masing masih dibagi lagi menjadi beberapa hal. Diterangkan oleh Subarsono (2012: 93). Variabel isi kebijakan ini mencakup:

- 1) Apakah sebuah program telah didukung oleh sumber daya yang memadai.
- 2) Manfaat yang diterima oleh target groups.
- 3) Ada perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan yang dibuat.

- 4) Apakah sebuah program sudah tepat pada letaknya.
- 5) Apakah sebuah kebijakan telah menjelaskan implementasinya dengan detail.
- 6) Sejauh mana kepentingan target groups ada dalam isi kebijakan.

B. Kelompok Tani Pengembangan dan Budidaya Kopi.

Menurut Kartasapoetra (dalam Mandasari,2014), kelompok tani terbentuk atas dasar kesadaran, jadi tidak secara paksa. Kelompok tani ini menghendaki terwujudnya pertanian yang baik,usaha tani yang optimal dan keluarga tani yang sejahtera dalam kehidupannya. Kemudian anggota kelompok tani diberi pembinaan,agar memiliki pandangan yang sama,berminat yang sama dan atas dasar kekeluargaan.

Di tingkat petani kopi berbagai upaya telah dilakukan untuk memperbaiki produksi dan mutu kopi, khususnya mutu citarasa. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani bahwa pendekatan kelompok dalam penyuluhan dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan penyuluhan dan juga mendorong penumbuhan kelembagaan petani (kelompok tani, gabungan kelompok tani,asosiasi komoditas pertanian, dan dewan komoditas pertanian nasional). Pembinaan usahatani melalui kelompok tani tidak lain memberikan pembinaan Pengembangan dan Budidaya Kopi sejak pembibitan,pemeliharaan serta memastikan petani melakukan pengembangan dan Budidaya kopi dengan baik dan menjaga kelangsungan produksi tanam kopi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Fungsi kelompok tani dalam Peraturan Menteri pertanian Republik Indonesia Nomor 67/Permentan/sm.050/12/2016 sebagai berikut:

- a. Kelas Belajar: kelompok tani merupakan wadah belajar mengajar bagi anggota untuk meningkatkan pengetahuan,keterampilan dan sikap agar tumbuh dan

berkembang menjadi Usahatani yang mandiri melalui pemanfaatan dan akses kepada sumber informasi dan teknologi sehingga dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan serta kehidupan yang lebih baik;

- b. Wahana Kerjasama: kelompok tani merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama, baik di antara sesama Petani dalam Poktan dan antarpoktan maupun dengan pihak lain, sehingga diharapkan Usahatani lebih efisien dan mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan serta lebih menguntungkan; dan
- c. Unit Produksi: Usahatani masing-masing anggota kelompok tani secara keseluruhan merupakan satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi usaha, dengan menjaga kuantitas, kualitas dan kontinuitas.

Berdasarkan uraian di atas, fungsi kelompok tani pada penelitian ini yaitu sebagai wadah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan memperkuat kerjasama antar sesama anggota kelompok tani serta dapat memecahkan permasalahan yang terjadi dalam usaha tani, sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas padi anggota kelompok tani.

1 Persyaratan Dasar Pembentukan Kelompok Tani

a) Masyarakat memahami kelompok tani

Sebelum membentuk kelompok tani, masyarakat terlebih dahulu memahami fungsi kelompok tani sebagai wadah aspirasi petani, dan wakil masyarakat petani yang bermitra dengan pemerintah desa maupun dengan kelompok peduli lainnya dengan penanganan lahan kritis secara berkelanjutan. Oleh sebab itu sebelum pembentukan kelompok tani perlu dilakukan sosialisasi dan penyamaan persepsi secara luas dalam masyarakat, khususnya kepada petani.

b) Masyarakat membutuhkan Keberadaan Kelompok Tani

Kelompok tani dibangun atas dasar persamaan kebutuhan dan tujuan dalam pengelolaan usaha tani maupun penanganan lahan kritis, sehingga kelompok tani yang terbentuk benar-benar menjadi wadah aspirasi dan kepentingan masyarakat petani serta dapat menumbuhkan partisipasi dan kesewadayaan dalam pelaksanaan penanganan lahan kritis.

c) Masyarakat menyepakati AD/ART Kelompok tani

Anggaran dasar dan Anggaran rumah Tangga (AD/ART) Kelompok tani disusun, dan dibahas dan disepakati bersama oleh petani. Sebaliknya AD/ART kelompok tani tidak dapat dibicarakan atau disepakati oleh hanya sekelompok orang saja yang mengatas-namakan seluruh petani.

d) Pembentukan Kelompok Tani Melibatkan Petani Luas

Pembentukan kelompok tani harus melibatkan petani dalam wilayah tersebut secara luas sejak awal. Keberhasilan pembentukan kelompok tani sangat tergantung pada keterlibatan yang signifikan dari petani dalam proses pembangunannya.

2 Langkah-Langkah Pembentukan Kelompok Tani

1) Sosialisasi Kelompok Tani Sebagai Kelembagaan Masyarakat.

Sebagai langkah awal dalam proses pembentukan kelompok Tani Pengembangan dan Budidaya Kopi adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran masyarakat petani tentang pentingnya keberadaan kelompok tani dalam penanganan lahan kritis melalui pengembangan dan budidaya kopi di desanya.

2) Penetapan kebutuhan Pembentukan atau Penguatan Kelembagaan kelompok Tani

Proses dan tahap pembentukan kelompok tani Pengembangan dan Budidaya kopi selanjutnya adalah musyawarah petani untuk menetapkan kebutuhan pembentukan Kelompok tani.

3) Musyawarah Pembentukan kelompok tani

Selanjutnya yang dilakukan adalah musyawarah pembentukan kelompok tani dengan menyepakati aturan dasar (AD/ART), serta melakukan pemilihan pengurus secara langsung.

4) Akuntabilitas dan Legitimasi

Hasil musyawarah pembentukan Kelompok tani adalah menetapkan AD/ART, daftar pengurus maupun pola pengorganisasian. Hal ini harus disosialisasikan kepada masyarakat/petani. Hasilnya adalah tersusunya pengurus kelompok Tani dan disepakati (AD/ART) kelompok Tani secara lengkap.

5) Legalisasi

Untuk legalisasi kelembagaan kelompok Tani di perkuat dengan surat keputusan kepala desa, sehingga diperoleh kesaksian yang legal.

3 Keanggotaan

- 1). Keanggotaan kelompok tani bersifat terbuka. Dalam arti setiap orang dapat menjadi anggota baru dengan mendaftar terlebih dahulu, calon anggota yang mendaftar dapat diterima dengan keputusan ketua dengan memperhatikan 2/3 dari seluruh anggota.

- 2). Yang menjadi anggota kelompok Tani adalah yang ikut mendanatangani pembentukan kelompok tani dan yang mendaftar sesudah kelompok tani terbentuk.

4 Metode Produksi dan Pengolahan

❖ Metode Produksi

a. Lahan dan Persiapan Lahan

Lahan di kawasan dataran tinggi Manggarai hampir seluruhnya pontesial di tanami kopi arabika pada umumnya untk daerah-daerah yang miring sebagai fungsi konservasi bisa dibuatkan terasering . Pada daerah dengan kemiringan dibawah 30° di buatkan teras individu, dimana pada masing-masing teras ini ditanam satu macam tanaman saja.

Untuk peremajaan, jarak tanam kopi di atur (2,5 x 2,5) m atau (2,5 x 2) m, sehingga di perlukan benih sebanyak 1.600 s.d. 2.000 batang/Ha. Benih kopi ditanam di lubang-lubang tanam yang di buat dengan ukuran (60 x 60 x 60) cm. Lubang tanam buat 3-6 bulan sebelum tanam dan diberi pupuk organik kurang lebih 5-10 kg per lubang. Pada waktu penanaman dan penutupan lubang, tanah di campur dengan pupuk kandang. Penaung ditanam 1 Tahun sebelum tanaman kopi di pindhkan ke kebun, dengan jumlah kurag lebih 25% dari total populasi pohon kopi.

b. Pembenihan

Varietas yang umum saat ini di budidaya oleh petani kawasan dataran tinggi Manggarai yag merupakan wilayah Indikasi Geografis KAFM adalah S-795, yellow katura/kolombia merah dan

andungsari. Pada masa mendatang di kawasan ini akan terus melakukan ekstensifikasi kopi Arabika varietas S-795 dan Andungsari.

Untuk tanaman-tanaman jenis baru:

- Pembibitan bisa dilaksanakan langsung oleh kelompok tani ataupun di beli dan penyedia/agen yang bersertifikat atau di terima dari instansi terkait.
- Rekomendasi MPIG terhadap varietas-varietas yang akan di kembangkan dalam wilayah perlindungan IG, di sampaikan kepada instansi terkait.

c. Pemeliharaan dan Perawatan Kopi

- Pemupukan tanaman dilaksanakan dua kali setahun pada awal dan akhir musim hujan. Sumber pupuk organik di dapatkan dari serasah dan beberapa campuran pupuk kandang.
- Pemangkasan kopi dilakukan dengan pemotongan cabang secara bergantian saat pangkasan lepas panen sehingga merangsang pembentukan cabang baru untuk pembuahan kopi
- Pengendalian hama dan penyakit seperti; Nematoda, Penggerak buah kopi dan penggerek cabang dan batang, di lakukan melalui sistem pengendalian Hama/penyakit terpadu, dengan memanfaatkan musuh-musuh alami dan agensia hayati dan atau pestisida organik dilarang di gunakan dalam kawasan perlindungan IG ini.

- Penaung yang umum di gunakan adalah pohon dadap , lamtoro.
- Petani biasa menggunakan serasah untuk memupuk tanaman dengan membuat rorak di sekitar taaman kopi. Ukuran rorak panjang 1 m dan lebar 30 cm dengan kedalaman 30 cm.

d. Peremajaan Kopi

Peremajaan di lakukan dengan cara:

- Penanama baru (menanam anakan barupada areal perkebunan kopi)
- Pemangkasan dan penyambungan (Pohon kopi robusta yang di kembangkan pada iklim kopi arabika di remajakan dan tunasnya di sambung dengan kopi arabika)
- Merebahkan pohon tua.

Peremajaan dengan cara pohon kopi yang tua di rebahkan ketanah , dan membiarkan tunas baru.

❖ Proses Produksi

Proses pengolahan Kopi di lakukan menerapkan metode olah basah-giling basah dan olah basah-giling kering yang di atur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP).

- Panen

Pengolahan kopi secara basah harus di mulai dengan pemetikan buah yang merah. Panen di lakukan secara manual yaitu pemetikan dengan tangan. Untuk dapat diolah dengan baik, panen harus dilakukan secara selektif. Petik hanya buah yang telah matang/merah untuk mendapatkan

minimal 95% kopi glondong merah, maksimal 5% glondong kuning, namun sama sekali tanpa ada glondong hijau atau hitam.

- Sortasi Buah

Sortasi dilakukan terhadap buah kopi hasil panen dengan tujuan untuk memisahkan buah kopi yang masih warna hijau, kering, kotoran dan lain-lain. Batas minimum kopi buah masak yang akan di olah adalah 95% merah. Pemeriksaan dilakukan sebelum proses pengolahan/pulper di masing-masing UPH.

- Perambangan

Sebelum di kupas, buah kopi merah yang sudah sortasi di rambang dalam air, aduk dan pisahkan buah terserang hama penggerek buah kopi.

- Pengupasan kulit buah kopi (pulping)

Pengupas kulit buah kopi(pulping) dilakukan dengan menggunakan mesin pengupas mekanik atau mesin yang di operasikan secara manual dengan tambahan air bersih secukupnya. Buah kopi yang di olah adalah buah kopi glondong merah segar. Hasil petik hari ini harus di stor dan di diolah di unit pengolahan pada hari yang sama, dan di proses sampai selesai. Atur setelan mesin pulper sampai hasil pengupasan yang baik, tidak pecah, sehingga kopi HS tidak banyak tercampur kulit, dan sebaliknya bagian kulit tidak banyak tercampur biji.

- Pembersihan Biji Kopi Hasil Pulper

Setelah di lakukan pengupasan kulit, biji kopi HS basah hasil kupasan di lakukan perambangan kedua dan biji yang mengapung di pisahkan. Sisa kulit buah yang masih terikut pada biji kopi bercangkang (kopi HS) juga di pisahkan sehingga biji kopi HS betul-betul bersih. Selain itu sebelum di fermentasi, pisahkan sisah kulit buah (pulp) dan kopi HS karena kulit yang terikut selama fermentasi akan menjadi busuk dan mencemari citarasa kopi.

- Fermentasi

Proses fermentasi di maksudkan untuk meluruhkan lendir agar mudah di cuci sehingga akan membentuk citarasa kopi yang baik. Fermentasi di lakukan secara alami dan sempurna tanpa adanya tambahan bahan apapun. Proses fermentasi dapat dilakukan dalam ember atau karung plastik bersih agar cairan lendir dapat meniris keluar. Proses fermentasi di lakukan selama 12 sampai 36 jam.

- Pencucian

Kopi yang sudah difermentasi perlu dilakukan pencucian untuk menghilangkan lendir dengan menggunakan air bersih. Pencucian dapat dilakukan secara manual dengan menggunakan tangan maupun secara mekanis menggunakan mesin pencuci lendir kopi (washer). Cuci bersih lendir hasil proses fermentasi sampai biji kopi kelihatan bersih kemudian di lanjutkan dengan penjemuran.

- Penjemuran

Penjemuran merupakan tahapan yang kritis untuk mendapatkan mutu fisik dan citarasa yang baik. Penjemuran di lakukan secara perlahan terutama pada saat awal (1-4 hari pertama)dengan menggunakan alas terpal. Untuk kopi olah basah-giling basah maka penjemuran di lakukan sampai kadar air mendapat 40% baru di huller/pemisah kulit tanduk, kemudian kopi green bean di jemur lagi di atas terpal sampai mencapai kadar air 11-12%. Kemudian untuk kopi olah basah giling kering penjemuran di lakukan di atas para-para dengan ketebalan 6-10 cm dengan pembalikan setiap 1 jam. Lakukan penjemuran sampai mencapai kadar air 11-12%

- Penyimpanan

Kopi HS kering dan kopi Ose yang di hasilkan di kemas dalam karung baru di tempat (gudang) penyimpanan oleh kelompok tani atau unit pengolahan gudang penyimpanan berupa ruang kering dan bersih, bebas dari bahan kimia yang memungkinkan terjadinya kontaminasi dengan bau asing, bebas asap, bebas puntung rokok dan obat nyamuk,serta tidak lembab.

- Pengemasan dan Pengiriman

Kopi HS yang siap di pasarkan harus di kemas menggunakan kemasan baru dengan menggunakan kemasan baru dengan ukuran sesuai permintaan pembeli.

5 Kegiatan Kontrol Pertanian

a. Kontrol mandiri

Masing-masing produsen harus mengecek bahwa suatu kebun memenuhi aturan-aturan dalam Buku Persyaratan diantaranya mengenai pohon penang, varietas (hanya untuk penanam baru), kerapatan (jarak tanam), pemeliharaan (khusus untuk pemupukan serta pengendalian hama dan penyakit) dan lain-lain. Masing-masing produsen harus tahu atau diberitahu tentang peraturan-peraturan yang harus ditaati dalam berkebun kopi oleh kelompok tani laporkan hasil pengontrolan mandiri kepada pengurus kelompok tani setiap 3 bulan.

b. Kontrol oleh kelompok tani

Setiap tahun, ketua atau pengurus kelompok tani harus meyakinkan bahwa buku persyaratan di penuhi oleh kebun-kebun anggotanya, dan harus melapor kepada kelompok Tani. Setiap kelompok tani bisa memilih cara-cara untuk mencapai kontrol ini. Pengurus kelompok tani bisa melakukannya sendiri, atau menunjuk seseorang yang bisa di tugaskan. Dalam kasus tertentu, dapat diadakan pertemuan untuk menentukan perlu tidaknya pemeriksaan khusus.

c. Kontrol oleh MPIG/Kelompok Tani

MPIG melakukan control setiap tahun, sebelum musim panen terhadap beberapa kelompok tani yang tergabung dalam MPIG KAFM yang dipilih secara acak. Kegiatan ini dilakukan oleh tim pengawas mutu yang ditunjuk oleh MPIG KAFM.

6 Kontrol Pengolahan

a.Kontrol oleh kelompok tani/unit pengolahan

Setiap unit pengolahan(kelompok tani atau UPH), terdapat satu orang yang bertugas mengontrol proses pengolahan untuk memastikan kesesuaian dengan yang telah ditetapkan dalam buku persyaratan. Petugas tersebut melakukan kontrol terhadap proses pengolahan setiap hari,diantaranya:

- Gelondong merah yang akan di olah berasal dari produsen terdaftar,
- Presentasi gelondong merah memenuhi persyaratan (≥95%),
- Proses pengupasan kulit dilakukan padamhari yang sama dengan pemetikan,
- Fermentasi dilakukan selama 12 sampai 36 jam,
- Penjemuran dilakukan diatas para-para atau terpal,dan tidak boleh bersentuhan langsung dengan tanah. Pengeringan dilakukan sampai mencapai kadar air 11-12%,
- Kebersihan unit pengolahan (termasuk mesin,sarana,fermentasi, lantai ruang pengolahan,penjemuran, dan lain-lain)
- Memastikan penyimpanan produk kopi HS dan Ose sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

b.Kontrol oleh MPIG

MPIG melakukan control setiap tahun, selama masa panen dan pengolahan terhadap beberapa klompok tani yang tergabung dalam MPIG KAFM yang dipilih secara acak. Kegiatan ini dilakukan oleh tim pengawas mutu yang di tunjuk oleh MPIG KAFM. Bila didapati bahwa Buku Persyaratan tidak sepenuhnya ditaati, maka MPIG

memutuskan tindakan-tindakan yang layak yang akan dijatuhkan, bisa berupa pemberian sebuah rekomendasi pemberhentian sampai penonaktifan sementara. Disemua kasus diatas, kemudian tindakan ini diperiksa setelah kelompok tani atau unit-unit pengolah telah melakukan evaluasi yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan-tuntutan dalam buku Persyaratan. Pengembangan dan Budidaya Kopi sangat di perhatikan dalam hal perawatan dan pengelolaanya dilakukan dengan sangat intensif sehingga kualitas yang di hasilkan bisa lebih baik dan mengembangkan teknik budidaya secara organik, karna jenis tanaman organik lebih di minati oleh para pencita kopi. Ini merupakan cara yang dilakukan oleh petani kopi untuk mempertahankan daya jual kopi.

Dari berbagai uraian tentang kelompok tani Pengembangan dan Budidaya Kopi maka dapat di kutip kelompok Tani merupakan suatu wadah bagi petani/peternak untuk berkumpul, bertukar pikiran dan bekerja sama dalam mengembangkan usaha tani didesa. Kelompok tani terbentuk atas dasar kesadaran, jadi tidak secara paksa. Kelompok tani ini menghendaki terwujudnya pertanian yang baik, usaha tani yang optimal dan keluarga tani yang sejahtera dalam kehidupannya.

Program Kelompok Tani Pengembangan dan Budidaya Kopi merupakan program dari pemerintah yang di berikan kepada desa dengan tujuan untuk memperbaiki sitem perekonomian yang lebih baik. Kelompok Tani merupakan organisasi non formal di pedesaan yang ditumbuh kembangkan “dari, oleh dan untuk petani”.

C. Implementasi Program Kelompok Tani Pengembangan dan Budidaya Kopi di Desa Golo Nderu, Kec. Pocoranaka, Kabupaten Manggarai Timur.

Implementasi Program Pengembangan dan Budidaya Kopi adalah program dari Dinas pertanian dengan tujuan untuk mempercepat sasaran peningkatan kesejahteraan petani, diharapkan pembinaan kelompok tani ini memunculkan cakrawala dan wawasan kebersamaan memecahkan dan merubah citra usahatani sekarang menjadi usahatani masa depan yang dapat membawa petani kearah perekonomian yang lebih baik.

Model yang di pakai dalam penelitian ini adalah model implementasi menurut yang Charles O.Jones yang meliputi: pengorganisasian, interpretasi dan penerapan sebagai berikiut:

- a. Organisasi : Pembentukan atau penataan kembali sumberdaya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan.

Berkaitan dengan Program Kelompok Tani pengembangan dan Budidaya Kopi, organisasi harus terstruktur dimana pembagian tugas atau unit kerja sesuai dengan fungsi masing-masing. Selain itu dalam pelaksanaan program, metode atau aturan yang dipakai dalam kelompok harus sesuai dengan ketentuan.

- b. Interpretasi : Menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.

Berkaitan dengan program tersebut, interpretasi dalam hal ini perencanaan dan pengarahan sangat diperlukan agar tercapainya suatu tujuan yang diinginkan oleh kelompok tani.

- c. Penerapan: Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Berkaitan dengan Program Tersebut, Penerapan dalam hal ini Tenaga Pendamping, Sarana dan Prasaran dalam kelompok harus menunjang keberhasilan program itu sendiri.